



LAPORAN KINERJA BIRO UMUM 2024



More Information
biroumum.dpr

Our Email

biroumum.dpr@gmail.com





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BIRO UMUM

TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Umum untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Umum.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami lakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA

NIP 196811251993022001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Gambaran Umum	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi	6
1.5 Struktur Organisasi	8
BAB II	11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI	11
2.2 Rencana Strategis Deputi Bidang Administrasi	14
2.3 Perjanjian Kinerja Biro Umum 2024	16
BAB III	20
AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 CAPAIAN KINERJA	20
3.2 REALISASI ANGGARAN	56
3.3 CAPAIAN PRESTASI	58
BAB IV	62
PENUTUP	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Biro Umum Tahun 2024.....	v
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Biro Umum Tahun 2024	9
Gambar 2. 1 <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Setjen DPR RI dengan Deputi Bidang Administrasi.....	15
Gambar 2. 2 <i>Cascading</i> Indikator Kinerja Deputi Bidang Administrasi dengan Biro Umum	16
Gambar 3. 1 Indeks Tata Kelola Pengadaan	23
Gambar 3. 2 Skor Indikator Tata Kelola Pengadaan.....	24
Gambar 3. 3 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	35
Gambar 3. 4 Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI	36
Gambar 3. 5 Nilai Setiap Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum ...	37
Gambar 3. 6 Persandingan Indeks Kepuasan atas Layanan di Deputi Bidang Administrasi	39
Gambar 3. 7 Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	43
Gambar 3. 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	44
Gambar 3. 9 Kinerja Anggaran Biro Umum	49
Gambar 3. 10 Perbandingan Kinerja Anggaran Biro Umum	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Biro Umum	X
Tabel 2. 1 Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI.....	12
Tabel 2. 2 Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2024 pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024.....	14
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Administrasi.....	14
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2024.....	16
Tabel 2. 5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	17
Tabel 3. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	22
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.....	22
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi	23
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....	24
Tabel 3. 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	25
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (K/L)	26
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (K/L)	26
Tabel 3. 9 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	31
Tabel 3. 10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 3. 11 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.....	37
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024.....	38
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	38
Tabel 3. 14 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	39
Tabel 3. 15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41

Tabel 3. 16 Penilaian IKPA Biro Umum 2024.....	44
Tabel 3. 17 Perbandingan Target dan Realisasi	45
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024.....	45
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	46
Tabel 3. 20 Tabel Persandingan IKPA di Deputi Bidang Administrasi	46
Tabel 3. 21 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	47
Tabel 3. 22 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
Tabel 3. 23 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.....	50
Tabel 3. 24 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.....	50
Tabel 3. 25 Perbandingan antara Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2024.....	51
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	52
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (K/L)	53
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Eselon II di Deputi Bidang Administrasi.....	53
Tabel 3. 29 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	54
Tabel 3. 30 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel 3. 31 Tabel Realisasi Anggaran Biro Umum Tahun Anggaran 2024.....	56

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka *good governance* dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2024 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Umum sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI. Secara umum, pada tahun 2024, Biro Umum telah berhasil mencapai seluruh target indikator kinerja dengan sangat baik dengan penggunaan anggaran yang efisien. Capaian realisasi anggaran Biro Umum pada tahun 2024 adalah sebesar Rp347.023.981.272,- atau sebesar 99,90% dari alokasi anggaran terakhir sebesar Rp312.454.989.832,- dan mengalami kenaikan sebesar 0,04% dari tahun 2023.

Sehingga capaian kinerja anggaran Biro Umum juga sudah menyelesaikan program promosi dan unggulan yang mendukung kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI, seperti program Dedikasi, Digitalisasi Kesehatan, Akreditasi Paripurna, Mekanisme RFID, Level 3 Proaktif, Peningkatan Kemampuan Pamdal DPR RI.

Semua itu dapat terlaksana berkat kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Biro Umum. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Umum atas kerja keras dan loyalitas yang tinggi, sehingga kerja kita bersama membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja tahun 2024 ini dapat bermanfaat dalam pengukuran kinerja Biro Umum dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro Umum serta Sekretariat Jenderal DPR RI di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO UMUM

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan satuan organisasi setingkat Eselon II yang memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan pengamanan, layanan pengadaan barang/jasa, pelayanan perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pelayanan kesehatan didasarkan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024.

Kinerja Biro Umum pada Tahun 2024 secara umum melampaui target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Tiga dari empat Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memiliki persentase capaian di atas 100%. Capaian kinerja Biro Umum pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Biro Umum

BIRO UMUM						
Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat “Baik” Skor 71	Predikat “Baik” Skor 75,5	107%	
	2.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas	3,35	3,733	111%	

BIRO UMUM					
Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
		Layanan Biro Umum			
	3.	Nilai IKPA Biro Umum - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 9,60 24,00 9,60 14,40 28,80	69,81 7,00 8,57 11,94 9,21 9,76 16,35	73%
	4.	Persentase realisasi anggaran Biro Umum	99,00%	99,90	101%

Dari pencapaian kinerja Anggaran, Biro Umum pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran terakhir sebesar Rp347.362.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp347.003.381.272,- atau sebesar 99,90% dan mengalami kenaikan sebesar 0,04 % dari tahun 2023. Biro Umum juga berhasil mendapatkan nilai 3,733 pada Survei Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum. Nilai tersebut diatas target dalam Perjanjian Kinerja sebesar 3,35. Biro Umum juga berhasil mempertahankan predikat “Baik” untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan.

Tahun 2024 Biro Umum telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi Biro sebagai berikut:

1. Program Dedikasi Kesehatan;
2. Digitalisasi Kesehatan;

3. Peningkatan Fasilitas Kesehatan;
4. Sewa dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional;
5. Pemenuhan Kebutuhan ATK dan ARTK Dewan dan Setjen;
6. Pemanfaatan RFID untuk Pembelian Bahan Bakar;
7. Pengembangan Kompetensi SDM di lingkungan Biro Umum;
8. Peningkatan nilai ITKP;
9. Integrasi Layanan *Call Center* Anggota DPR RI Call Center 139 dengan 110, dan 139 dengan 119 dalam 24 jam;
10. Mensterilkan jalur evakuasi Senayan Park;
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan DPR RI; dan
12. Dukungan Kegiatan-Kegiatan Kenegaraan

Berdasarkan hasil analisis efisiensi antara capaian kinerja terhadap target dan anggaran untuk masing-masing indikator kinerja, Biro Umum telah dikategorikan efisien dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Hasil analisis menunjukkan tiga dari empat indikator kinerja Biro Umum mendapat skor ≥ 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) skor analisis efisiensi 1,06
- b. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum skor analisis efisiensi 1,11
- c. Nilai IKPA skor analisis efisiensi 0,72
- d. Persentase realisasi anggaran Biro Umum skor analisis efisiensi 1,01

Secara umum Tahun 2024, Kinerja Biro Umum Tahun 2024 telah akuntabel dan efisien.



1



PENDAHULUAN

- Gambaran Umum
- Dasar Hukum
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Struktur Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pengamanan, layanan pengadaan barang/jasa, pelayanan perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka Biro Umum yang merupakan unsur dari Sekretariat Jenderal DPR RI, wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara akuntabilitas sesuai amanah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan yang berkaitan, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI terus berupaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam menjalankan proses bisnis unit kerja. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui responsivitas layanan-layanan yang ada di Biro Umum dalam menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota DPR RI maupun pegawai Setjen DPR RI. Biro Umum juga berupaya untuk mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan di dalam maupun di luar Setjen DPR RI untuk memastikan SDM Biro Umum memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai. Biro Umum senantiasa membantu unit-unit kerja maupun Anggota DPR RI dalam menyelenggarakan kegiatan substantif maupun non substantif. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari Biro Umum dalam menyelenggarakan proses bisnis unit kerja selama Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2023;

9. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2023;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada pasal 263 sampai dengan pasal 281 menjelaskan secara detail tugas dan fungsi jajaran di Biro Umum. Pada tahun 2023, Biro Umum mengalami perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang berlaku per bulan April tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023. Perubahan SOTK ini mempengaruhi komposisi jajaran pejabat di Biro Umum, pembagian tugas fungsi dan wewenang, serta pengelolaan anggaran.

1. Tugas

Menyelenggarakan pengelolaan pengamanan, layanan pengadaan barang/jasa, pelayanan perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pelayanan kesehatan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengamanan, layanan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pelayanan kesehatan;
- c. pengelolaan pengamanan;
- d. penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa;
- e. pengelolaan perlengkapan;
- f. pengelolaan dan pelayanan kendaraan dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- h. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengadaan barang/jasa dan kesehatan;
- i. penyusunan laporan kinerja Biro Umum; dan
- j. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputy Bidang Administrasi.

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi guna mencapai *good governance*, Biro Umum berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran sehingga dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diinginkan. Hal tersebut tidak dapat dicapai dengan mudah karena organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang proses bisnisnya adalah pelayanan kepada anggota DPR RI memiliki sifat dinamis. Berikut ini merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2024:

1. Pelantikan Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 berjumlah 580 (lima ratus delapan puluh) orang. Jumlah ini naik dari periode sebelumnya yang berjumlah 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang. Terdapat 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota DPR RI petahana dan 253 (dua ratus lima puluh tiga) anggota DPR RI baru. Hal ini menjadi tantangan di bidang-bidang yang menjadi tugas dan fungsi Biro Umum seperti ATK dan ARTK untuk anggota DPR RI, layanan kesehatan untuk anggota DPR RI dan keluarga, pengamanan di lingkungan kerja anggota DPR RI. Kebutuhan-kebutuhan tersebut membutuhkan tindak lanjut secepatnya agar tidak menghambat kinerja anggota DPR RI.

2. Penambahan Indikator Kinerja Baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

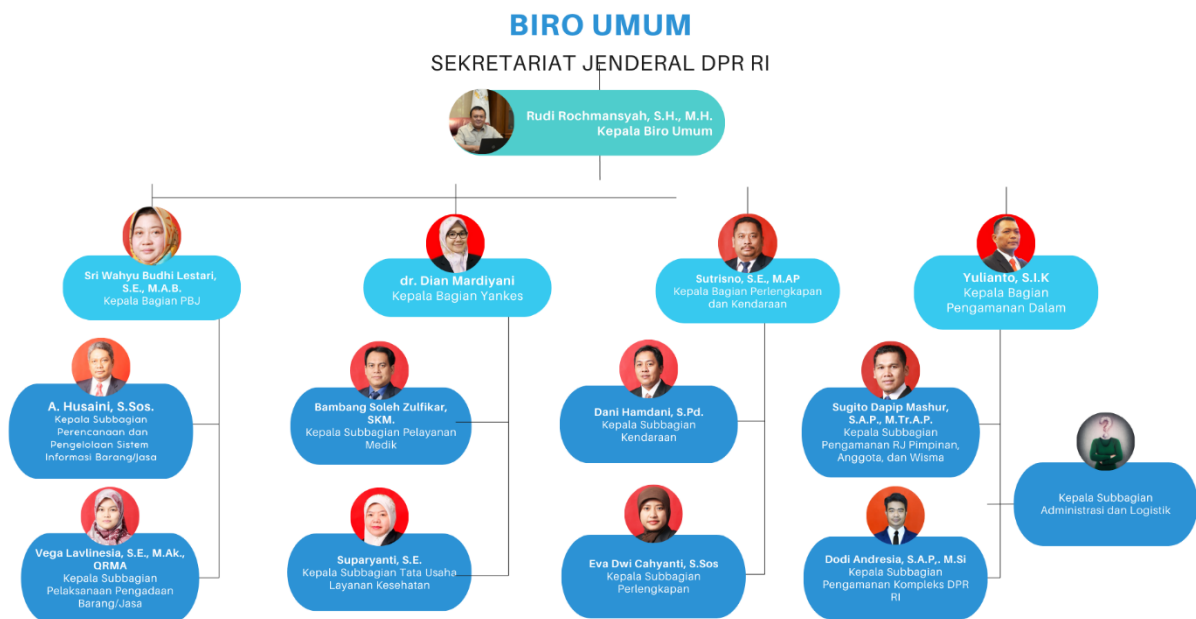
Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Unit Kerja Eselon II lain pada tahun 2024 mendapatkan indikator kinerja yang baru yaitu Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Penilaian IKPA merupakan indikator kinerja yang baru diimplementasikan kepada unit kerja Eselon II pada tahun 2024, dimana pada tahun sebelumnya hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja Biro Keuangan. Penilaian IKPA memiliki beberapa komponen penilaian seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Capaian Output. Tahun pertama target Nilai IKPA yang ditetapkan adalah 96. Target tinggi tersebut menjadi tantangan yang cukup

berat mengingat Biro Umum merupakan unit kerja dengan pengelolaan anggaran yang kompleks dibandingkan unit kerja lain.

3. Pemenuhan Rekomendasi atas Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan indikator kinerja turunan dari indikator kinerja Deputi Bidang Administrasi yang diamanatkan kepada Biro Umum. Upaya peningkatan nilai ITKP terus dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain mempertahankan nilai yang telah diraih pada tahun 2023 dengan predikat “Cukup” atau nilai 51,62, Biro Umum juga berusaha untuk memenuhi rekomendasi atas penilaian ITKP tahun sebelumnya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu perolehan predikat “Baik” dengan minimal nilai 71. Salah satu upaya tindak lanjut rekomendasi penilaian ITKP adalah terkait pemenuhan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah Pejabat Fungsional PPBJ yang harus dipenuhi adalah 15 orang, dengan jumlah yang sudah ada saat ini adalah 5 orang. Kekurangan tersebut harus dipenuhi sebelum dilakukan penilaian terhadap ITKP Tahun 2024 agar mencapai nilai sesuai target yang telah ditetapkan.
4. Optimalisasi Layanan *Call Center* Anggota DPR RI
Salah satu layanan penunjang tugas dan fungsi anggota DPR RI yang dilaksanakan oleh Biro Umum adalah *Call Center* Anggota DPR RI. Layanan *Call Center* ini sudah diinisiasi sejak tahun 2020, akan tetapi pemanfaatannya oleh anggota DPR RI masih belum optimal. Upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan layanan *Call Center* Anggota DPR RI terus dilakukan salah satunya dengan integrasi *Call Center* Anggota DPR RI dengan Pusat Krisis Kemenkes RI dan *Call Center* Kepolisian Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah jangkauan layanan *Call Center* di daerah-daerah yang masih minim fasilitas penunjang. Anggota DPR RI yang berasal dari 80 (delapan puluh) Daerah Pemilihan (Dapil) mengharuskan Layanan *Call Center* Anggota DPR RI dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan layanan tersebut.

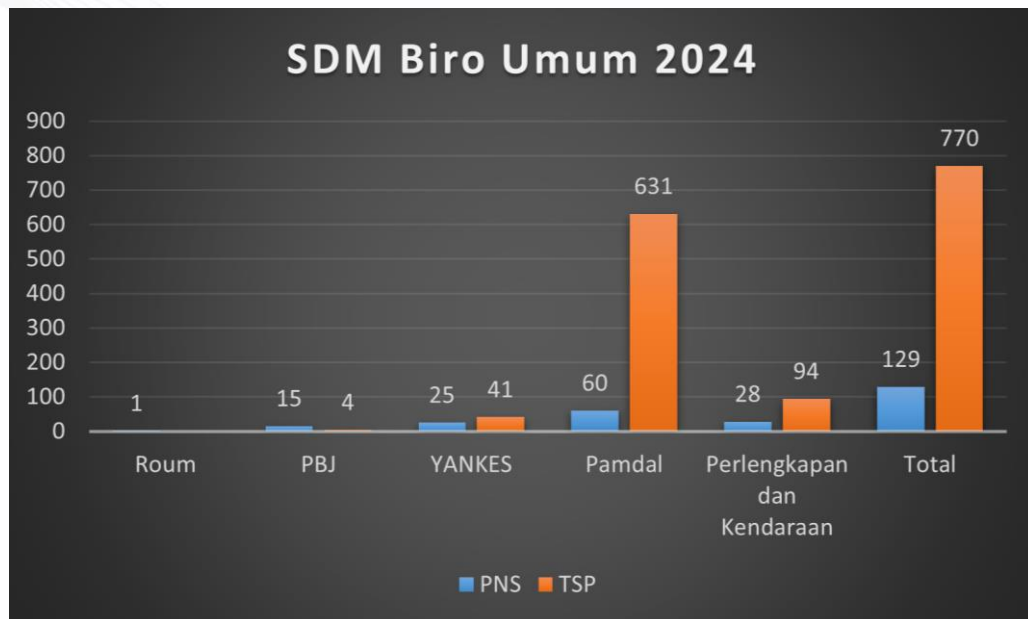
1.5 Struktur Organisasi

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024, Biro Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dibantu oleh 4 (empat) Bagian unit kerja, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Biro Umum Tahun 2024

Untuk menjalankan organisasi, Biro Umum didukung Sumber Daya Manusia yang berjumlah 913 (sembilan ratus tiga belas) Pegawai, terdiri dari 129 (seratus dua puluh sembilan) orang PNS dan 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) orang TSP atau PPNASN yang dibagi kedalam 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Pengamanan Dalam, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Perlengkapan dan Kendaraan, dan Bagian Layanan Kesehatan. Distribusi SDM di Biro Umum dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Biro Umum Tahun 2024



2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Biro Umum merujuk pada Perjanjian Kinerja sebagai pedoman. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan dikomitmenkan setiap tahun, menjadi target bersama di jajaran Biro Umum untuk dicapai dengan upaya terbaik. Perumusan perjanjian kinerja disebut juga perencanaan kinerja. Dalam menyusun perencanaan kinerja, yang menjadi pedoman adalah visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2020 – 2024. Rencana strategis yang diturunkan hingga menjadi perjanjian kinerja telah mempertimbangkan potensi ketercapaian, peluang, dan kendala yang diperkirakan akan terjadi.

2.1 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Sejalan dengan ditetapkannya Persekjen Nomor 9 Tahun 2023, Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI mengalami 2 (dua) kali perubahan/revisi, terakhir pada bulan Oktober Tahun 2023. Pada dokumen Renstra disebutkan visi, misi, dan tujuan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI seperti yang tercantum pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI

❖ Visi	“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”
❖ Misi	1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
❖ Tujuan	1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih. 3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Sumber: Renstra Setjen 2020-2024

Perjanjian kinerja Biro Umum sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI. Biro Umum dalam fungsinya sebagai *Supporting System* kepada Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI diharapkan mampu mengantisipasi dan menghadapi setiap tantangan yang ditemui di masa depan sekaligus untuk meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan dan pelayanan kepada Anggota Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam upaya mewujudkan kinerja Biro Umum menetapkan 4 (empat) sasaran, yaitu:

- 1) Mewujudkan penatausahaan pengadaan sarana dan prasarana kantor yang akuntabel dan tepat waktu;
- 2) Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan yang prima;
- 3) Mewujudkan penatausahaan dan pelayanan kendaraan dinas yang prima;
- 4) Mewujudkan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban yang prima.

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Biro Umum adalah:

- 1) Terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang profesional dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya layanan kesehatan yang berstandar nasional.
- 3) Terwujudnya perlengkapan dan kendaraan berupa sarana dan prasarana perkantoran yang baik sesuai dengan standar nasional.
- 4) Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas yang profesional.
- 5) Terwujudnya pelayanan pengamanan Gedung Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Jabatan Anggota, wisma DPR RI yang memenuhi standar.

Dengan merumuskan tujuan strategi Biro Umum dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai, mengingat tujuan strategi dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Agar dapat diukur keberhasilan organisasi mencapai tujuannya diperlukan indikator kinerja yang diukur sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan kegiatan tersebut diatas, maka Biro Umum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk peningkatan pelayanan administratif dan sumberdaya yang meliputi layanan pengadaan, layanan perlengkapan dan kendaraan, layanan kesehatan

serta keamanan mempunyai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang mengalami perubahan di tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2. 2 Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2024 pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target			
			2021	2022	2023	2024
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor					
	1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Inisiasi	Inisiasi	Predikat “Baik”	Predikat “Baik”
	2.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,20	3,20	3,34	3,35

2.2 Rencana Strategis Deputy Bidang Administrasi

Agar sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPR RI dapat terwujud, sasaran program unit kerja Eselon I di bawah Sekretaris Jenderal DPR RI harus disusun selaras. Sasaran program dan indikator kinerja dari Deputy Bidang Administrasi yang terdapat pada tabel 2.3 kemudian diturunkan kepada unit eselon II setiap tahunnya selama periode Renstra 2020-2024 dan memungkinkan adanya perubahan menyesuaikan kebijakan.

Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Rencana Strategis Deputy Bidang Administrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Inisiasi	Esensi	Baik	Baik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
di Setjen DPR RI yang berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91	91	95	96
	Nilai Indeks Pengelolaan Aset	-	3,20	3,65	3,70
	Nilai Sistem Merit	3	Kategori III, Baik	355,5	360
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Bidang Administrasi	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi	3,22	3,33	3,34	3,35
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi	B	B	BB (75,00)	BB (76,00)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan 4. Skor Maturitas SPIP 5. Tingkat kapabilitas APIP 6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK 7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR
3.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Administrasi - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output 3. Nilai Indeks Pengelolaan Aset 4. Nilai Sistem Merit
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Administrasi	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Administrasi yang berkualitas	1. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi

Gambar 2. 1 Cascading Indikator Kinerja Setjen DPR RI dengan Deputi Bidang Administrasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputy Administrasi
		- Revisi DIPA
		- Deviasi Halaman III DIPA
2.	Terpenuhiya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Administrasi	- Penyerapan Anggaran
		- Belanja Kontraktual
		- Penyelesaian Tagihan
		- Capaian Output
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Administrasi yang berkualitas	3. Nilai Indeks Pengelolaan Aset
		4. Nilai Sistem Merit
		1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Administrasi
		1. Nilai Evaluasi SAKIP dilingkup Deputy Bidang Administrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan
		2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum
		3. Nilai IKPA Biro Umum
		- Revisi DIPA
		- Deviasi Halaman III DIPA
		- Penyerapan Anggaran
		- Belanja Kontraktual
		- Penyelesaian Tagihan
		- Capaian Output
		4. Persentase Realisasi Anggaran

Gambar 2. 2 Cascading Indikator Kinerja Deputy Bidang Administrasi dengan Biro Umum

2.3 Perjanjian Kinerja Biro Umum 2024

Pada Tahun 2023 telah dilakukan penetapan Perjanjian Kinerja sebagai program strategis Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan direalisasikan pada akhir Tahun 2024. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat “Baik”, skor minimal 71
	2.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,35
	3.	Nilai IKPA Biro Umum	96
		- Revisi DIPA	9,60
		- Deviasi Halaman III DIPA	9,60
		- Penyerapan Anggaran	24,00
		- Belanja Kontraktual	9,60
		- Penyelesaian Tagihan	14,40
		- Capaian Output	28,80
		Persentase realisasi anggaran Biro Umum	99%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp347.362.800.000,-

Terdapat perbedaan target kinerja antara Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan waktu penyusunan antara Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Renja Tahun 2024 yang disusun harus diunggah ke dalam aplikasi KRISNA BAPPENAS di bulan Mei 2023. Sedangkan penyusunan Perjanjian Kinerja baru dilakukan setelah penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2024 di bulan Desember 2023. Saat penyusunan Renja, basis data kinerja yang digunakan adalah tahun 2022, sedangkan saat penyusunan PK menggunakan realisasi kinerja tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat kenaikan pada beberapa target seperti pada Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum dan Persentase Realisasi Anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 juga memunculkan indikator kinerja baru yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 belum ditambahkan. Perbandingan perjanjian kinerja berdasarkan dokumen terakhir yang berlaku, dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tahun 2023				Tahun 2024			
Sasaran	Indikator kinerja		Target	Sasaran	Indikator kinerja		Target
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat "Baik" Skor 71	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat "Baik" Skor 71
	2.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,34		2.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,35

Tahun 2023				Tahun 2024			
Sasaran	Indikator kinerja		Target	Sasaran	Indikator kinerja		Target
	3.	Persentase realisasi anggaran Biro Umum	98,60%		3.	Nilai IKPA Biro Umum - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 9,60 24,00 9,60 14,40 28,80
					4.	Persentase realisasi anggaran Biro Umum	99%



3

AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran
- Capaian Prestasi



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif Biro Umum untuk lebih meningkatkan kinerja Biro Umum dimasa yang akan datang.

Pengukuran hasil kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah yang mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membanding antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaian kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja atas capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat 7 (tujuh) poin perbandingan dalam mengukur capaian kinerja setiap indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat memberikan *output* dan *outcome* yang optimal dalam peningkatan kinerja organisasi yang sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra dan perjanjian kinerja.

Secara garis besar, capaian kinerja Biro Umum tahun 2024, jika dibandingkan antara target dengan realisasi, terdapat 3 (tiga) indikator yang tercapai lebih dari 100%, dan 1 (satu) indikator yang tercapai kurang dari 100%. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat “Baik”	Predikat “Baik” Skor 75,5	107%
	2.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,35	3,733	111%
	3.	Nilai IKPA Biro Umum - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 9,60 24,00 9,60 14,40 28,80	69,81	73%
	4.	Persentase realisasi anggaran Biro Umum	99%	99,90%	101 %

Capaian kinerja Biro Umum jika dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di tahun 2022 dan 2023, sehingga terdapat perbedaan pada target dan realisasi. Tahun 2022 tidak ada target yang dapat dikonversi ke dalam angka, namun tercapai sesuai target, sehingga dapat diberikan capaian 100%. Dan tahun 2023, untuk indikator ITKP walaupun target berupa kualitatif (predikat), tetapi tetap ada skor nilai yang menjadi acuan. Tahun 2023 terdapat perubahan target untuk indikator dimaksud, semula ditargetkan predikat “cukup” menjadi predikat “baik”, dan tidak tercapai, yang disebabkan oleh beberapa faktor dan terkait dengan proses yang lintas tahun.

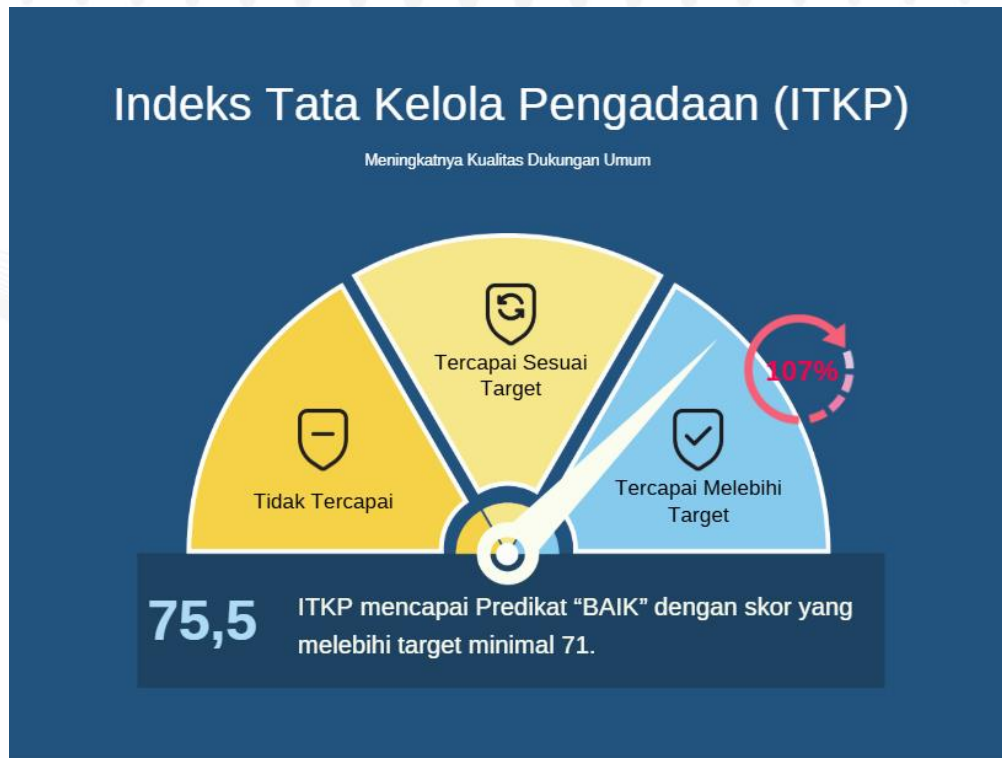
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

2023						2024				
Sasaran	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1.	Indeks Pengelolaan PBJ	Inisiasi	Esensi	100%	1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat “Baik” Skor 71	Predikat “Baik” Skor 75,5	107%
	2.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,20	3,34	103%	2.	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,35	3,733	111%
	3.	Persentase realisasi anggaran Biro Umum	98,60%	99,80%	100,2%	3.	Nilai IKPA Biro Umum - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	96 9,60 9,60 24,00 9,60 14,40 28,80	69,81 7,00 8,57 11,94 9,21 9,76 16,35	73%
						4	Persentase realisasi anggaran Biro Umum	99,0	99,90	101%

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				Capaian 2024	
		2021	2022	2023	2024	2024	%
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor						
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Inisiasi	Esensi	Predikat "Baik" Skor Minimal 71	Predikat "Baik" Skor Minimal 71	Predikat "Baik" Skor 75,7	107%
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,20	3,20	3,34	3,35	3,733	111%

1. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)



Gambar 3. 1 Indeks Tata Kelola Pengadaan

1.1 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi

Target	Realisasi	Capaian
Predikat "Baik" Skor 71	Predikat "Baik" Skor 75,5	107%

Target kinerja dari indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di tahun 2024 kembali mengalami penyesuaian. Semula ditargetkan mencapai predikat "baik" tanpa menyebutkan skor, menjadi ditargetkan mencapai predikat "baik" dengan skor minimal 71. ITKP DPR RI tahun 2024 mendapat predikat "baik" dengan skor 75,5 atau tercapai 107% dari target kinerja setelah perubahan.

1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja		2022			2023			2024		
	2022- 2023	2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatn ya Kualitas Dukungan Umum	Indeks Pengelola an PBJ, lalu Indeks Tata Kelola Pengada an	Indeks Tata Kelola Pengadaa n	Esensi	Esensi	100%	Predikat "Baik" Skor 71	Predikat "Cukup" Skor 51,62	73%	Predikat "Baik" Skor 71	Predikat "Baik" Skor 75,5	107%

Terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023. Semula menggunakan indikator "Indeks Pengelolaan PBJ", menjadi indikator "Indeks Tata Kelola Pengadaan". Juga terdapat perubahan target di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 untuk indikator kinerja ITKP. Pada tahun 2024, target ITKP telah menggunakan predikat yang mengacu pada skor sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi seperti pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3. 2 Skor Indikator Tata Kelola Pengadaan

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3. 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat “Baik” Skor 75,5	Predikat “Baik” Skor Min. 71	107%

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 Revisi Ke-2 Perubahan Struktur Organisasi), diketahui bahwa indikator ITKP pada tahun 2023 telah tercapai predikat “cukup” dengan skor 51,62. Sedangkan target pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2024 untuk indikator kinerja tersebut adalah predikat “baik” dengan skor minimal 71, dan berhasil dicapai di tahun 2024 dengan predikat “Baik” dan skor 75,5 atau dengan tingkat kemajuan capaian terhadap Renstra tahun 2024 telah tercapai sebesar 107%.

1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (K/L)

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (K/L)

Kementerian/ Lembaga	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	7	8	9	7	8	9
DPR RI	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa ITKP	Esensi	Esensi	100%	Baik. Skor Min. 71	Cukup. Skor 51,62	73%
LKPP		ITKP	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	100%

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (K/L)

Kementerian/Lembaga	Sasaran Program	Tahun	Indikator Kinerja			
				Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
DPR RI	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	2024	ITKP	Predikat "Baik" Skor Min. 71	Predikat "Baik" Skor 75,5	107%
LKPP		2024	ITKP	Baik	Baik	100%

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah Lembaga yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menjadi rujukan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sejak tahap perencanaan pengadaan. LKPP secara konsisten menetapkan ITKP sebagai salah satu indikator kinerja, dan sejak tahun 2021 mendapatkan predikat "Baik" dengan skor yang mengalami peningkatan. Artinya, ada proses perbaikan di beberapa tahun untuk

mendapatkan skor tersebut, bahkan untuk Lembaga yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa dan semua indikator dalam ITKP adalah hasil penghitungan yang dikelola oleh sistem informasi LKPP.

UKPBJ DPR RI yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berada di bawah Biro Umum telah menetapkan ITKP sebagai indikator kinerja pada tahun 2023, dengan target awal adalah predikat “Cukup”, yang kemudian diubah menjadi predikat “Baik: dengan skor minimal 71. Sebelum tahun 2023, indikator kinerjanya adalah indeks pengelolaan barang/jasa yang mengukur dari sisi maturitas UKPBJ, tidak memperhatikan indikator pemanfaatan sistem pengadaan, dan kualitas/kuantitas SDM JF PPBJ dalam proses pemenuhan jumlah JF PBJ.

Sebelum tahun 2023, UKPBJ DPR RI menitikberatkan pada tingkat maturitas karena masih berproses mencari bentuk dan tata kelola yang sesuai dengan ketentuan dan karakter organisasi. Namun, jika tahun 2023, UKPBJ DPR RI menjadikan ITKP sebagai indikator kinerja, maka harus melakukan perubahan yang signifikan dan diberikan dukungan kebijakan untuk melaksanakan tata kelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahun pertama dengan indikator kinerja ITKP dan langsung ditargetkan dengan predikat “baik”, menjadi kerja keras Biro Umum. Dengan pencapaian skor 51,62 dan masih masuk kategori predikat “cukup”, menyebabkan indikator ini tidak tercapai 100%, atau hanya tercapai 73%. Namun demikian, skor 51,62 di tahun 2023 telah menunjukkan lompatan yang tinggi dari skor ITKP tahun 2022 senilai 9,9 atau predikat “kurang”, menunjukkan telah dilakukan percepatan perbaikan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Dan, di tahun 2024, yang merupakan tahun kedua target kinerja ITKP dengan predikat “Baik” dan skor minimal 71, UKPBJ DPR RI yang berada di bawah pengelolaan Biro Umum telah berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh organisasi. Pencapaian ITKP di tahun 2024 dengan predikat “Baik” dan skor 75,5 atau tercapai 107%, merupakan lompatan kedua yang dilakukan atas indikator kinerja ini. Biro Umum telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan kinerja yang terbaik, dan terus menerus melaksanakan perbaikan-perbaikan di setiap lini pengelolaan barang dan jasa. Dan LKPP sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah,

telah menjalin koordinasi dan komunikasi yang sinergis dan harmonis, sehingga dapat menghasilkan kinerja positif bagi organisasi.

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Seperti yang dijelaskan pada Analisa 1.4, bahwa indikator kinerja ITKP merupakan target kinerja tahun kedua pada tahun 2024, sehingga UKPBJ DPR RI telah memiliki konsep strategi pencapaian yang dapat dilaksanakan, walaupun tetap membutuhkan penyesuaian dan dukung penuh dari pimpinan.

ITKP tahun 2021, DPR mendapatkan predikat “kurang” dengan skor 20. Lalu, tahun 2022, ITKP DPR masih mendapatkan predikat “kurang” dengan skor 9,9. Di kedua tahun ini, ITKP belum menjadi indikator kinerja, tetapi indeks pengelolaan pengadaan. Seperti diketahui, indeks pengelolaan pengadaan adalah ukuran kematangan UKPBJ di Kementerian/Lembaga yang mengukur kesiapan UKPBJ untuk berdiri secara mandiri, tidak digabungkan dengan bagian lain. Hal ini adalah wajar, karena di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Bagian PBJ sedang di tahap peralihan dari nomenklatur dan cara kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) menjadi Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

ITKP tahun 2023, yang merupakan tahun pertama penilaian kinerja ini ditetapkan untuk Biro Umum, namun telah diberikan target yang cukup tinggi dan kompleks, yaitu predikat “Baik” dengan skor minimal 71. Penyesuaian target tersebut terjadi di bulan Oktober 2023, yaitu bulan terakhir untuk beberapa indikator penilaian ITKP telah selesai dilakukan oleh LKPP. Oleh sebab itu, ITKP tahun 2023 hanya mampu tercapai predikat “cukup” dengan skor 51,62, dengan kontribusi terbesar dari indikator maturitas.

ITKP tahun 2024, tercapai melampaui target, salah satu faktornya adalah upaya Biro Umum agar setiap indikator ITKP memberikan kontribusi yang maksimal. Secara garis besar, ITKP terdiri dari 3 indikator yang dinilai, yaitu pemanfaatan sistem pengadaan (skor 30), kualitas SDM PPBJ (skor 30), dan maturitas UKPBJ (skor 40). Setiap indikator memiliki karakteristik, syarat dan ketentuan, serta batas waktu penilaian yang berbeda-beda.

Indikator pemanfaatan sistem pengadaan, terbagi menjadi 10 aspek yang dinilai. Indikator ini telah ditutup penilaiannya pada tanggal 31 Januari dan tanggal 31 Maret. Untuk mendapatkan skor pada indikator ini, perlu dukungan dan kerjasama dari seluruh pelaku PBJ, mulai dari pengelola UKPBJ (jajaran di UKPBJ termasuk JF PPBJ), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran, sampai pelaku usaha (vendor, penyedia barang/jasa). Hal ini disebabkan oleh pengguna sistem pengadaan adalah setiap peran/user yang bertindak sebagai pelaku PBJ. Dengan kata lain, capaian atas indikator ini merupakan kerja bersama setiap pihak yang terkait. Upaya yang telah dilakukan:

1. Menargetkan RUP diumumkan 100% pada Aplikasi SiRUP. Dengan dukungan penuh para KPA dan Biro Umum, RUP tahun 2024 berhasil diumumkan 100% sebelum akhir Februari 2024;
2. Mengajukan klarifikasi Pagu Pengadaan untuk tahun 2024 ke LKPP, menjadi Rp1,2 Triliun dari Pagu DIPA Rp6 Triliun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa skor atas RUP diumumkan 100% dari Pagu Pengadaan;
3. Memantau perkembangan pelaksanaan PBJ secara periodik untuk setiap metode pengadaan telah dicatatkan pada sistem sampai dengan tahap “selesai”;
4. Memberikan pendampingan dan konsultasi dengan LKPP untuk PPK dan unit kerja yang memiliki kendala-kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan PBJ.

Indikator kedua adalah kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, berkontribusi skor 40 pada ITKP jika dapat terpenuhi. Ukurannya adalah jumlah JF PPBJ sesuai dengan rekomendasi LKPP. Sampai dengan awal tahun 2024, jumlah JF PPBJ hasil rekomendasi LKPP adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, dan di tahun 2023 terpenuhi 5 (lima) orang. Namun demikian, untuk memenuhi menjadi 23 (dua puluh tiga) orang JF PPBJ menjadi tidak sejalan dengan Pagu Pengadaan yang diklarifikasi berkurang signifikan, karena jika Pagu Pengadaan tidak besar ($\frac{1}{2}$ dari Pagu DIPA) maka SDM JF PPBJ yang dibutuhkan tidak sebanyak rekomendasi awal. Oleh karena itu, strategi yang dilaksanakan adalah penyesuaian jumlah JF PPBJ dan pemenuhan JF PPBJ dengan maksimal. Strategi ini berhasil meningkatkan skor, semula 5,62 menjadi 12.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengungkit nilai dari indikator ini, antara lain:

1. Bersurat ke LKPP tentang klarifikasi pagu pengadaan. Harapannya, dengan berkurangnya pagu pengadaan, LKPP dapat mengubah rekomendasi jumlah JF PBJ di DPR;
2. Bersurat ke LKPP tentang pengajuan penyesuaian jumlah JF PPBJ sebagai tindak lanjut rapat konsultasi dengan Direktorat Pengembangan SDM dan Organisasi LKPP, yang menyimpulkan bahwa ada potensi penyesuaian jumlah JF PPBJ jika melihat rekam jejak Pagu Pengadaan DPR RI yang tidak sebesar Pagu DIPA. Surat dan kertas kerja diajukan ke LKPP dan dilanjutkan koordinasi intensif. Hasilnya adalah rekomendasi jumlah JF PPBJ semula 23 (dua puluh tiga) orang, menjadi 15 (lima belas) orang, dengan rincian 9 (sembilan) orang di JF PPBJ Ahli Pertama, 5 (lima) orang di JF PPBJ Ahli Muda, dan 1 (satu) orang di JF PPBJ Ahli Madya;
3. Mengajukan ke Pusbangkom untuk menambah jumlah ASN yang memiliki Sertifikat L (dasar PBJ), dan telah dilaksanakan. Menghasilkan sejumlah nama untuk diajukan mengikuti ujikom dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dalam mengelola PBJ sebagai pejabat pengadaan atau staf PPK;
4. Memberikan rekomendasi nama-nama ASN untuk diberikan kesempatan seperti pada angka 3;
5. Mengajukan 4 (empat) nama ASN yang telah memenuhi syarat ujikom untuk mengikuti ujikom sebelum bulan Oktober 2024;
6. Berhasil didapat 2 (dua) orang ASN yang lulus ujikom dan dilantik sebelum akhir Oktober 2024.

Indikator ketiga adalah tingkat kematangan UKPBJ dengan skor maksimal 40, jika dapat memenuhi ketentuan. Indikator ini telah diupayakan dengan maksimal, dan merupakan dalam cakupan wewenang Biro Umum untuk mencapai skor optimal. DPR berhasil menyelesaikan seluruh dokumen yang menjadi penilaian atas indikator dimaksud, sehingga berhak atas skor 40. Dokumen yang dinilai adalah 12 dari 17 sertifikat UKPBJ dan pemenuhan 9 dari 9 standar UKPBJ dengan capaian level 3 pro aktif.

Hal ini dikuatkan dengan diterimanya piagam penghargaan yang secara resmi menyatakan UKPBJ DPR RI telah mencapai level 3 pro aktif, setelah melewati tahapan verifikasi dan validasi dokumen-dokumen pendukung. Pencapaian ini menjadi indikator UKPBJ DPR RI akan memasuki fase selanjutnya, yaitu menuju UKPBJ Strategis Level 4, yang menjadi pusat unggulan PBJ.

Tabel 3. 9 Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat “Baik” Skor Min. 71	Predikat “Baik” Skor 75,5	107%	Faktor penyebab kegagalan, yaitu: a. Pemanfaatan sistem pengadaan dengan beberapa indikator/komponen penilaian yang telah ditutup pada 31 Januari 2024; b. Jumlah ASN yang dapat diajukan mengikuti Ujikom LKPP masih terbatas.	Upaya untuk mencapai target skor ITKP. Telah dilakukan: a. Surat ke LKPP untuk penyesuaian jumlah SDM JF PBJ; b. Pendampingan ke SDM PBJ internal dan pelaku usaha; c. Monitoring dan evaluasi perkembangan SiRUP dan SPSE; d. Pengembangan kompetensi SDM PBJ.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Upaya yang Dilakukan
						Faktor penyebab peningkatan nilai ITKP, yaitu: a. RUP diumumkan 100%; b. Pemenuhan standar maturitas UKPBJ 9/9; Penyesuaian jumlah rekomendasi JF PPBJ.	

1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat “Baik” Skor Min. 71	Predikat “Baik” Skor 75,5	107%	Rp1.948.590.000,-	Rp1.947.659.745,-	99,95%	1,06 “efisien”

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa Biro Umum mencapai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) predikat “Baik” dengan skor 75,5 atau tercapai 107% dari target kinerja.

Peningkatan tercapai dengan upaya melaksanakan kegiatan yang berfokus pada 3 (tiga) hal utama, yaitu pemanfaatan sistem pengadaan, pengembangan kompetensi SDM, dan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada pemenuhan maturitas UKPBJ.

Dalam pemanfaatan sistem pengadaan, kegiatan yang dilakukan antara lain pendampingan ke unit kerja dan PPK dalam perekaman SiRUP dan SPSE, pembinaan pelaku usaha yang ada di lingkungan DPR agar melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan LKPP.

Pengembangan kompetensi SDM dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menambah keilmuan dan peningkatan pemahaman SDM PBJ baik di Bagian PBJ, maupun di luar Bagian PBJ, berupa kegiatan bimbingan teknis, *workshop*, FGD, sosialisasi, dan konsultasi ke Direktorat Advokasi LKPP.

Dan pelaksanaan kegiatan yang berfokus pada pemenuhan maturitas UKPBJ, dilakukan dengan cara selektif dalam pemilihan tema kegiatan, dan tertib pendokumentasian setiap kegiatan untuk keperluan penilaian lebih lanjut.

Jika disandingkan dengan jumlah anggaran untuk mencapai target kinerja yang terealisasi sebesar 99,95%, maka didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian target telah dilakukan dengan efisien. Penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,95% untuk mendapatkan capaian kinerja 107%, maka tingkat efisiensinya sebesar 1,06 atau efisien (nilai lebih dari sama dengan 1). Dengan kata lain, Biro Umum telah efisien menggunakan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan strategi dan upaya untuk mencapai hasil melebihi target kinerja.

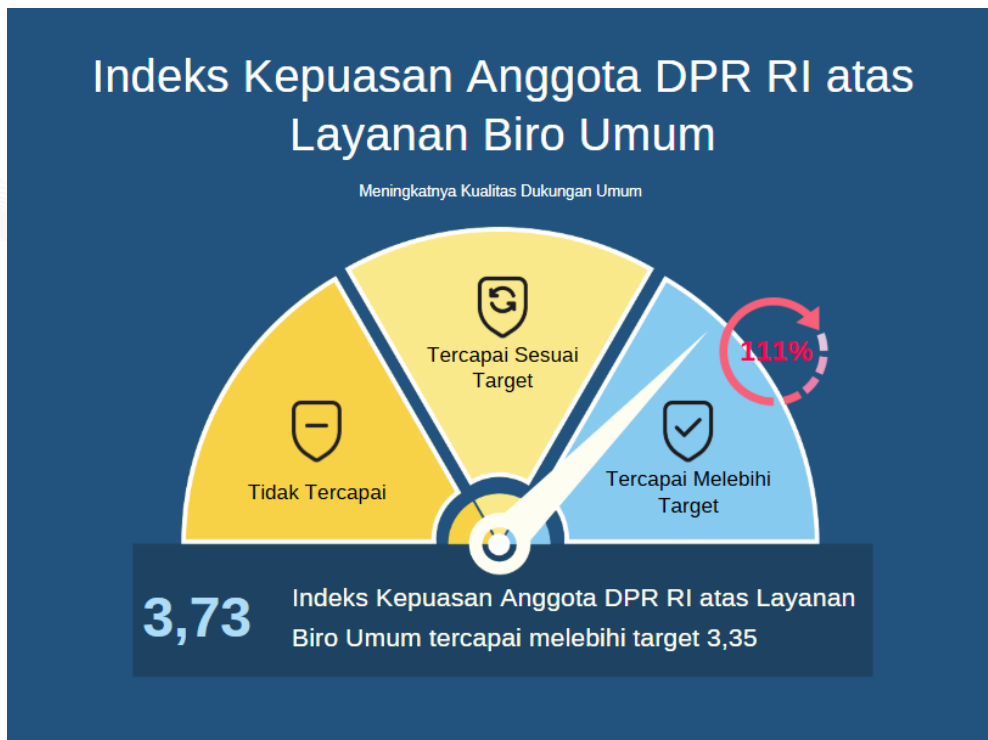
1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan untuk meningkatkan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan pada tahun 2024 yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan;
2. Penyesuaian dan pemenuhan SDM PPBJ secara jumlah dan kualitas;
3. Pengakuan maturitas UKPBJ level 3 pro aktif dari LKPP.



2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum



Gambar 3. 3 Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum

Sebagaimana dengan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2020-2024 Revisi Ke-2 (Perubahan Struktur Organisasi) telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Melalui Perjanjian Kinerja Biro Umum dalam Visi & Misinya, bahwa dalam upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Umum, Biro Umum terus melakukan peningkatan pelayanan administratif dan sumber daya yang meliputi layanan pengadaan barang/jasa, layanan ATK ARTK kendaraan, layanan kesehatan serta layanan keamanan.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan untuk tahun 2024 terdapat 4 (empat) penilaian layanan yang terdiri dari layanan kesehatan, layanan ATK ARTK dan kendaraan, layanan pengadaan barang/jasa, dan layanan pengamanan DPR RI. Total responden dalam Survei Kepuasan berjumlah 820 (delapan ratus dua puluh)

orang responden yang terdiri dari 233 (dua ratus tiga puluh tiga) Anggota DPR RI dan 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) non Anggota DPR RI.

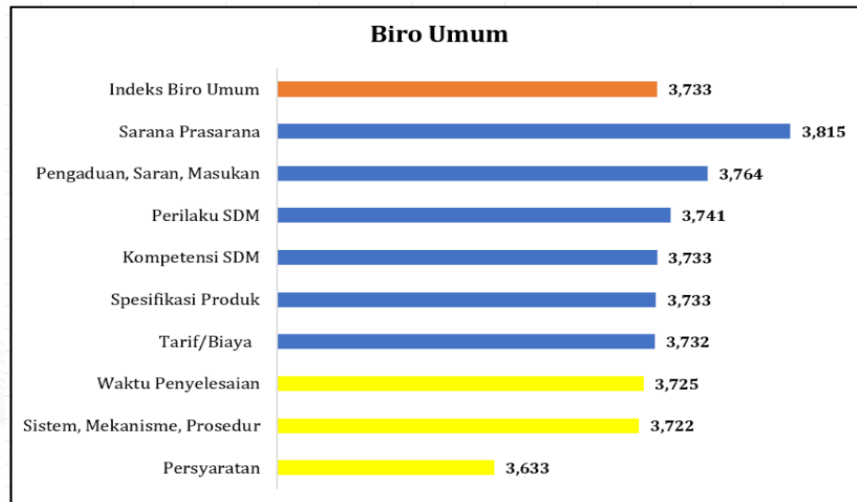
Oleh karena itu, Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum ditopang oleh kinerja Bagian Yankes, Bagian Perlengkapan dan Kendaraan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dan Bagian Pengamanan Dalam. Terdapat 9 (sembilan) unsur penilaian pada indeks layanan Biro Umum, seperti gambar 3.4 berikut ini.

Unsur Penilaian	Tahun 2024	
	NI	NIK
Biaya/Tarif	3,732	93,294
Persyaratan	3,633	90,832
Perilaku SDM	3,741	93,536
Waktu Penyelesaian Layanan	3,725	93,122
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,722	93,055
Kompetensi SDM	3,733	93,328
Spesifikasi Produk	3,733	93,314
Sarana Prasarana	3,815	95,380
Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,764	94,109
Indeks Layanan Biro Umum	3,733	93,330

Sumber: Data diolah, 2024.

Gambar 3. 4 Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI

Hasil survei kepuasan masyarakat, dalam hal ini adalah Anggota DPR RI, atas layanan Biro Umum menunjukkan bahwa unsur tertinggi adalah unsur "tidak ada biaya/tarif", dan unsur terendah adalah unsur "layanan pengaduan, konsultasi, saran, dan masukan", dapat dilihat pada Gambar 3.5. Informasi ini akan digunakan oleh Biro Umum dalam menyusun rencana perbaikan selanjutnya, agar dapat meningkatkan indeks kepuasan anggota DPR RI atas layanan Biro Umum.



Gambar 3. 5 Nilai Setiap Unsur Penilaian Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum

2.1 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 11 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Target	Realisasi	Capaian
3,35	3,733	111%

Indikator kinerja tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Umum ditargetkan mendapat nilai 3,35. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di tahun 2024, Biro Umum mendapatkan nilai 3,733. Target telah tercapai melampaui 100%, tepatnya 111%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja Bagian Layanan Kesehatan (Yankes) dan Bagian Pengamanan Dalam (Pamdal) dari kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sarana prasarana, serta inovasi-inovasi yang dilakukan di sepanjang tahun 2024.

2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,20	3,34	103%	3,34	3,649	109%	3,35	3,733	111%

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari tahun 2022-2024 secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan di setiap awal tahun.

Peningkatan capaian atas Indikator Kinerja Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum menunjukkan terdapat peningkatan kualitas layanan yang dirasakan secara langsung oleh Anggota DPR RI atas layanan Biro Umum, yaitu dari layanan Pelayanan Kesehatan dan layanan Pengamanan Dalam. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan layanan di sektor publik.

2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Persentase
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,733	3,35	111%

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 Revisi Ke-2 Perubahan Struktur Organisasi), diketahui bahwa indikator kinerja “Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kesehatan” telah melebihi target yaitu tercapai sebesar 111%, dimana capaian kinerja

tahun 2024 adalah sebesar 3,733. Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh Bagian Layanan Kesehatan Biro Umum adalah melakukan pengembangan layanan kesehatan berbasis digital, penambahan alat kesehatan, peningkatan mutu layanan publik, dan pengembangan kompetensi SDM Tenaga Kesehatan.

2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Berdasarkan hasil Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan Biro Umum, nilai yang didapatkan adalah 3,733. Standar Nasional untuk Survei Kepuasan Masyarakat di Kementerian/Lembaga belum ditentukan sehingga hasil Survei Kepuasan atas Layanan Biro Umum tidak dapat disandingkan dengan Standar Nasional. Hasil Survei Kepuasan yang diraih Biro Umum sama dengan Survei Kepuasan yang diraih oleh Deputi Bidang Administrasi yaitu 3,73. Namun jika dibandingkan dengan unit eselon II yang lain di bawah Deputi Bidang Administrasi, capaian hasil survei kepuasan yang diraih Biro Umum berada di atas Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma serta Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Deputi Administrasi	Indeks	
Biro	NK	NIK
Biro Rensi	3,7258	93,1442
Biro Keuangan	3,7515	93,7871
Biro SDMA	3,7329	93,323
Biro Hukum & Pengaduan Masyarakat	3,7371	93,4275
Biro Umum	3,7332	93,3303
Biro PBW	3,7375	93,4387
	3,7363	93,4085

Gambar 3. 6 Persandingan Indeks Kepuasan atas Layanan di Deputi Bidang Administrasi

2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3. 14 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya yang Dilakukan
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,4	3,733	111%	Peningkatan kualitas sumber daya manusia; Peningkatan sarana prasarana pendukung layanan;	Pelatihan dan sertifikasi yang terkait dengan layanan yankes dan pandal;

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya yang Dilakukan
					Inovasi layanan.	Peremajaan dan penambahan sarpras yang mendukung penambahan layanan yankes dan pamdal; Digitalisasi Kesehatan, call center terintegrasi dengan instansi terkait kesehatan dan pengamanan, Pengelolaan BBM dengan RFID menjadi terukur dan efisien, Responsif atas pemenuhan sarana prasarana yang dinamis dari unit kerja Telah tersusun SOP tata cara akses masuk

Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum mencapai target dengan capaian 111%, atau melebihi yang ditargetkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor pengungkit tercapainya target adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sarana prasarana. 2 (dua) hal yang menjadi ujung tombak terlaksananya layanan yang berkualitas ke Anggota DPR RI.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Biro Umum mengimplementasikan serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap sumber daya manusia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efisien dan efektif agar target kinerja dapat tercapai.

Sebagai contoh Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang dilaksanakan Bagian YanKes sehingga pelayanan kesehatan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan Pelatihan Bela Diri yang dilaksanakan Bagian Pamdal untuk meningkatkan pengamanan Gedung Perkantoran MPR/DPR/DPD RI. Hal hal tersebut sebagai contoh kegiatan yang dilakukan oleh Biro Umum untuk mencapai target kinerja.

Demi mencapai target kinerja, Biro Umum telah mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan serangkaian peningkatan signifikan pada sarana dan prasarana untuk mencapai target Indeks Kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan Biro Umum. Mulai dari memperbaharui alat alat dan fasilitas Kesehatan, dan memperkuat fasilitas yang diperlukan dalam melakukan pengamanan.

2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,35	3,733	111%	Rp116.772.259.000,-	Rp116.427.758.840,-	99,70%	89,475% "Efisien"

Dalam mencapai target indikator kinerja, dibutuhkan sumber daya, diantaranya adalah anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya target. Indikator indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Umum ditopang oleh layanan ATK ARTK dan kendaraan, layanan pengadaan barang/jasa, layanan kesehatan, dan layanan pengamanan DPR RI sehingga sumber daya anggaran yang dijadikan pembanding adalah anggaran Bagian Yankes, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Perlengkapan dan Kendaraan, serta Bagian Pamdal.

Berdasarkan tabel 3.15, bahwa untuk mencapai nilai kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Umum dengan nilai 3,733 atau capaian 111%, dibutuhkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp116.427.758.840,- atau 99,70% dari total anggaran Rp116.772.259.000.

Penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,70% untuk mendapatkan capaian kinerja 109%, maka tingkat efisiensinya sebesar 89,475% atau efisien (nilai kurang dari sama dengan 100%). Dengan kata lain, Biro Umum telah efisien menggunakan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan strategi dan upaya untuk mencapai hasil melebihi target kinerja.

2.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

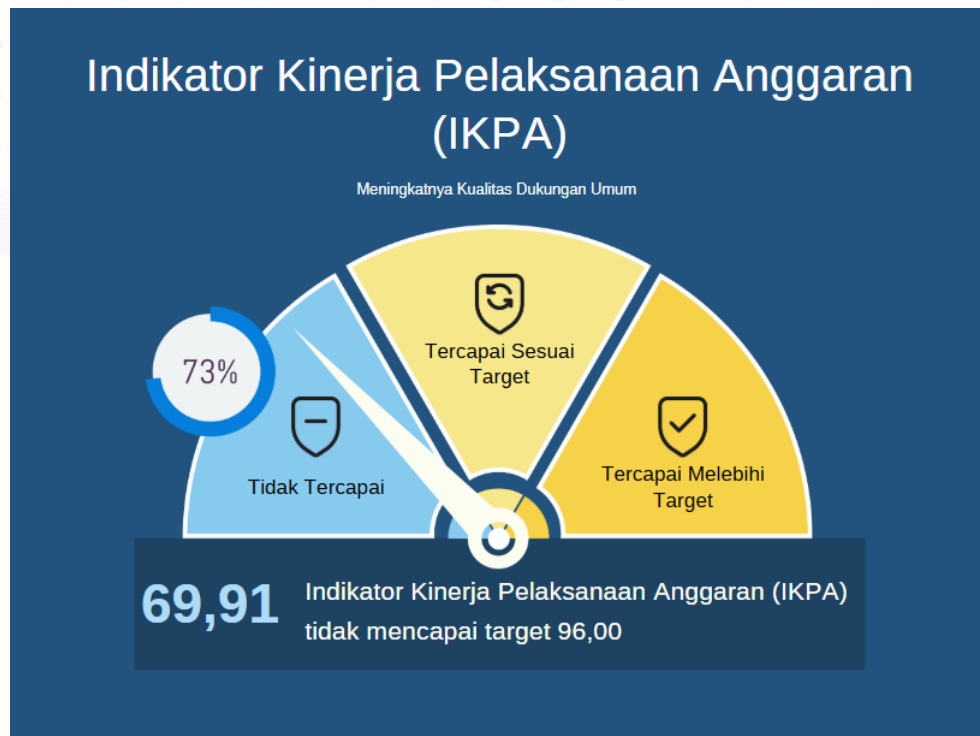
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Biro Umum selama tahun 2024 agar tercapainya target kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi sistem layanan kesehatan;
2. Mengikuti penilaian standarisasi pelayanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan melalui akreditasi klinik;
3. Melakukan pembelian alat kesehatan yang canggih;
4. Melakukan pelatihan terhadap SDM tenaga kesehatan dan tenaga administrasi;
5. Mengikuti penilaian kinerja dari Kementerian PAN dan RB mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Melakukan kegiatan Bimtek Praktek Perhitungan TKDN Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, Jasa Konsultasi, dan Pekerjaan Konstruksi Serta Penerapannya Pada Pengadaan Barang/Jasa;
7. Melaksanakan kegiatan paket *meeting* dalam kota dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Memenuhi kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bagi Anggota Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI
9. Memenuhi kebutuhan ATK dan ARTK untuk keperluan Anggota Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI
10. Melakukan Pemeliharaan dan Pelayanan Kendaraan Dinas dan Operasional untuk menunjang kegiatan Anggota Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI
11. Pelatihan bela diri karate;
12. Pembentukan Pengamanan Khusus dan Korps Musik Pengamanan Dalam DPR RI



Gambar 3. 7 Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum

3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



Gambar 3. 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator kinerja baru yang diterapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024. Indikator kinerja penilaian IKPA belum tercantum pada Perjanjian Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tahun 2023. Secara umum IKPA merupakan alat ukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada unit kerja. Penilaian IKPA sendiri terdiri dari beberapa komponen antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Capaian *Output*.

Tabel 3. 16 Penilaian IKPA Biro Umum 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
IKPA	96	69,81	73%
Revisi DIPA	9,60	7,00	
Deviasi Halaman III DIPA	9,60	8,57	
Penyerapan Anggaran	24,00	11,94	
Belanja Kontraktual	9,60	9,21	

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Penyelesaian Tagihan	14,40	9,76	
Capaian Output	28,80	16,35	

Konversi Bobot dibagi 90 disebabkan indikator Pengelolaan Kasbon dan KKP belum masuk dalam penghitungan di aplikasi.

3.1 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 17 Perbandingan Target dan Realisasi

Target	Realisasi	Capaian
96	69,81	73%

Target kinerja dari indikator Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2024 merupakan tahun pertama menjadi indikator kinerja di Biro Umum. Target kinerja IKPA Biro Umum adalah 96, dan realisasi tercapai 69,81 atau tercapai 73%. Sebagai target kinerja yang pertama kali dicanangkan, pencapaian ini merupakan prestasi tersendiri bagi Biro Umum, karena dengan karakteristik layanan Biro Umum dan besaran pagu anggaran yang dikelola termasuk kategori besar, Biro Umum telah mampu mencapai skor yang optimal.

3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Nilai IKPA Biro Umum							96	69,81	73%

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai IKPA dijadikan indikator kinerja unit kerja eselon II adalah pertama kali di tahun 2024,

sehingga belum terdapat komparasi dengan tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian di tahun 2024 ini dapat menjadi batu pijakan untuk perbaikan secara terus menerus di tahun mendatang.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	Persentase
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Nilai IKPA Biro Umum	96	69,81	73%

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 Revisi Ke-2 Perubahan Struktur Organisasi), diketahui bahwa indikator kinerja “IKPA” telah mencapai nilai 69,81 atau tercapai 73% dari target nilai 96. Dalam mengupayakan capaian kinerja tersebut, Biro Umum telah melaksanakan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengoptimalkan kinerja anggaran dengan memperhatikan kesesuaian dengan penilaian IKPA tanpa mengurangi kualitas layanan kepada seluruh *stakeholders* Setjen DPR RI.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator kinerja yang baru diimplementasikan ke Unit Kerja Eselon II pada tahun 2024. Periode pertama ini Biro Umum mendapatkan nilai IKPA sebesar 69,81. Nilai ini masih di bawah target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 96.

Tabel 3. 20 Tabel Persandingan IKPA di Deputy Bidang Administrasi

Indikator Kinerja	Target	Capaian	Standar Nasional
Nilai IKPA Biro Umum	96	69,81	n/A

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3. 21 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya yang Dilakukan
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Nilai IKPA di Biro Umum	96	69,81	73%	1. Tahun pertama ditetapkan menjadi indikator kinerja unit kerja eselon II; 2. Tidak adanya masa transisi untuk internalisasi syarat dan ketentuan penilaian IKPA; 3. Belum terpolanya pelaksanaan strategi pencapaian kinerja IKPA.	Mengupayakan pelaksanaan anggaran sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku; Mengkoordinasi kan pelaksanaan anggaran di Biro Umum.

Indikator nilai IKPA Biro Umum belum mencapai target dengan capaian 73% dari target nilai 96. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kinerja nilai IKPA ini adalah tahun pertama dijadikan indikator kinerja, dan tidak ada masa transisi bagi unit kerja eselon II untuk beradaptasi dan menyusun strategi pencapaiannya. Adapun strategi pencapaian IKPA yang dilakukan adalah terbatas pada mengupayakan koordinasi dan komunikasi di setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan anggaran, revisi anggaran, sampai dengan pelaksanaan anggaran.

Secara prioritas, dukungan dan layanan kepada *stakeholders* Setjen DPR RI terutama pada Anggota DPR RI adalah yang utama untuk Biro Umum, walau dengan konsekuensi tidak tercapainya salah satu indikator kinerja Biro Umum yaitu nilai IKPA. Sebagai contoh, dalam pemenuhan kinerja dukungan layanan kepada Anggota DPR RI, terdapat kebutuhan revisi anggaran yang sifatnya mendadak dan mendesak, sehingga tidak dimungkinkan untuk pengajuan revisi secara kolektif, dan dampaknya secara langsung adalah berkurangnya nilai IKPA Biro Umum atas indikator revisi anggaran.

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 22 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Nilai "IKPA" Biro Umum	96	69,81	73%	Rp4.246.131.000	Rp4.243.489.118	99,94%	137,43% "Tidak Efisien"

Dalam mencapai target indikator kinerja, dibutuhkan sumber daya, diantaranya adalah anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya target. Indikator IKPA secara garis besar dikelola oleh Biro Umum dan menggunakan anggaran Biro Umum, walaupun dalam pelaksanaannya anggaran Biro Umum juga digunakan untuk mengkoordinasi pencapaian lainnya.

Berdasarkan tabel 3.22, bahwa untuk mencapai nilai IKPA Biro Umum dengan nilai 69,81 atau capaian 73%, dibutuhkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp4.243.489.118,- atau 99,94% dari total anggaran Rp4.246.131.000,-

Penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,94% untuk mendapatkan capaian kinerja 73%, maka tingkat efisiensinya sebesar 137,43% atau kurang efisien (lebih dari 100%). Dengan kata lain, Biro Umum belum efisien menggunakan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan strategi dan upaya untuk mencapai hasil melebihi target kinerja.

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan Biro Umum selama tahun 2024 agar tercapainya target kinerja nilai IKPA Biro Umum sebesar 73%, antara lain sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyelesaian pelaksanaan anggaran (tagihan) di Biro Umum;

2. Mengkoordinasikan pengajuan revisi anggaran secara kolektif di Biro Umum;
3. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dan rencana pelaksanaan anggaran per periode;
4. Mengkoordinasikan data kontraktual atas tagihan kontrak di Biro Umum.

4. Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum



Gambar 3. 9 Kinerja Anggaran Biro Umum

Realisasi anggaran pemerintah memiliki peranan yang penting dalam mencapai *Good Governance* dan *Clean Government*. Realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan membantu dalam pencapaian visi dan misi pemerintah. Realisasi anggaran secara langsung mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Umum. Dengan anggaran yang tepat, program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien, menciptakan hasil maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

4.1 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 23 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Target	Realisasi	Capaian
99,0%	99,90%	101%

Pada tahun anggaran 2024, Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI merealisasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar **Rp347.023.981.272** (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) atau mencapai realisasi sebesar 99,90% dari pagu anggaran sebesar **Rp347.362.800.000** (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan sisa anggaran sebesar **Rp338.818.728,-** (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga apabila dihubungkan dengan target yang ingin dicapai pada indikator “Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum” pada tahun 2024, diperoleh nilai capaian realisasi anggaran sebesar 101%.

Tabel 3. 24 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Kode	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor				
	1	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.948.590.000	Rp.1.947.659.745	99,95%
	2	Layanan Perlengkapan dan Kendaraan	Rp200.200.918.000	Rp200.162.408.943	99,98%
	3	Layanan Pengamanan Dalam	Rp110.760.089.000	Rp110.493.769.597	99,76%
	4	Layanan Kesehatan	Rp30.207.072.000	Rp30.176.653.869	99,90%

Kode	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	5	TU Biro Umum	Rp4.246.131.000	Rp4.243.489.118	99,94%
TOTAL BIRO UMUM			Rp347.362.800.000	Rp347.023.981.272	99,90%

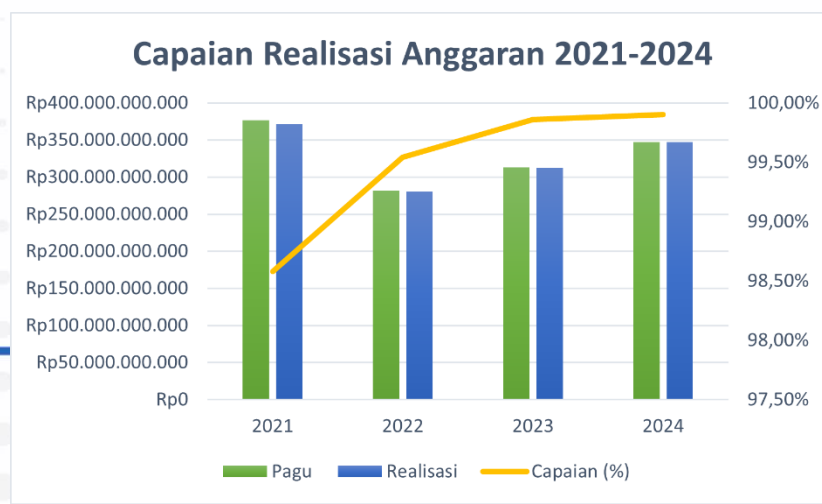
4.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Realisasi Anggaran

Tabel 3. 25 Perbandingan antara Realisasi Anggaran Tahun 2021 – 2024

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
2021	Rp376.681.069.000	Rp371.329.927.601	98,58%
2022	Rp281.631.913.000	Rp280.323.125.919	99,54%
2023	Rp312.906.245.000	Rp312.454.989.832	99,86%
2024	Rp347.362.800.000	Rp347.023.981.272	99,90%

Biro Umum melaksanakan program dan kegiatan dukungan umum pada tahun 2024 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp347.362.800.000,- terdapat kenaikan pagu anggaran Biro Umum dari tahun 2023 sebesar Rp312.906.245.000,- yaitu sebesar Rp34.097.136.272,- atau naik sebesar 10,89%. Perbandingan realisasi anggaran Biro Umum dalam 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 3.25.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir capaian realisasi anggaran Biro Umum cenderung mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Umum memperhatikan kinerja anggarannya, setiap rencana kegiatan dan rencana anggaran yang diajukan untuk setiap tahun anggaran mampu dilaksanakan.



Gambar 3. 10 Perbandingan Kinerja Anggaran Biro Umum

Berdasarkan grafik dan tabel tersebut, penetapan target persentase realisasi anggaran dari tahun 2021 ke 2022 memiliki target yang sama yaitu sebesar 95% selanjutnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 98,60%. Dengan kondisi tersebut, persentase realisasi anggaran tetap dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya.

4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	Persentase
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	99%	99,95%	101%

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 Revisi Ke-2 Perubahan Struktur Organisasi), diketahui bahwa indikator kinerja persentase realisasi anggaran Biro Umum telah mencapai nilai 99,95% atau tercapai 101% dari target nilai 99%. Dalam mengupayakan capaian kinerja tersebut, Biro Umum telah melaksanakan seluruh rencana kegiatan dan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan tepat waktu dan tepat proses, sehingga tidak terdapat anggaran yang tidak dioptimalkan dalam menjalankan tugas fungsi memberikan dukungan layanan ke *stakeholders* DPR.

4.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (K/L)

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (K/L)

Kementerian / Lembaga	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
DPR RI	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Persentase realisasi anggaran Biro Umum	95%	99,54%	105%	98,60 %	99,86%	101%	99%	99,95 %	101%

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Eselon II di Deputy Bidang Administrasi

Unit Eselon II	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Biro Hukum dan Dumas	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Hukum dan Dumas	Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Dumas	92%	99,87%	109%	93%	99,59%	107%	98%	99,82 %	102%
Biro SDMA	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro SDMA	Persentase realisasi anggaran Biro SDMA	92%	99,45%	108%	95%	99,97%	105%	98%	99,71 %	102%
Biro Rensi	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Rensi	Persentase realisasi anggaran Biro Rensi	95%	99,92%	105%	99%	99,99%	101%	99%	99,82 %	101%
Biro Keuangan	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Keuangan	Persentase realisasi anggaran Biro Keuangan	93%	99,45%	107%	95%	97,85%	103%	98%	98,05 %	100%
Biro PBW	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro PBW	Persentase realisasi anggaran Biro PBW	98,5 %	99,93%	101%	99%	99,97%	101%	99%	99,95 %	101%

Biro Umum berada di bawah garis koordinasi Deputi Bidang Administrasi, bersama dengan 5 (lima) biro lainnya, yaitu Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Hukum dan Dumas), Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Biro Perencanaan dan Organisasi (Rensi), Biro Keuangan, dan Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma (PBW). Dengan menyandingkan kinerja anggaran dalam 1 unit eselon I, dapat menunjukkan kinerja Biro Umum dalam melaksanakan/merealisasikan anggaran yang terdapat pada Pagu DIPA yang konsisten mencapai target setiap tahunnya.

4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3. 29 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya yang Dilakukan
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	99%	99,90%	101%	Komitmen pimpinan dalam memberikan dukungan ke Biro Umum dalam pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk keperluan stakeholders DPR.	Melakukan koordinasi intensif secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan anggaran Biro Umum

Berdasarkan tabel 3.29, telah tersaji data tercapainya kinerja anggaran Biro Umum sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pencapaian kinerja anggaran ini didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan yang telah direncanakan bersama, komitmen Biro Umum beserta jajarannya dalam memberikan layanan terbaik kepada seluruh stakeholders DPR sesuai dengan tugas fungsi setiap unit kerja yang ada di Biro Umum.

Tahun 2024, Biro Umum mendapatkan tambahan anggaran di Bulan Oktober, untuk beberapa pekerjaan yang menjadi prioritas organisasi. Dan Biro Umum mampu melaksanakan realisasi tambahan anggaran sebelum tahun anggaran berakhir, sehingga tercatat realisasi anggaran Biro Umum sebesar 99,90%.

4.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 30 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	99%	99,90%	101%	R347.362.800.000,-	Rp347.023.981.272,-	99,90%	99,00 "Efisien"

Pencapaian kinerja anggaran yang ditunjukkan dengan persentase realisasi anggaran Biro Umum dinilai efisien dalam penggunaan sumber daya. Untuk mendapatkan hasil kinerja 101%, menggunakan sumber daya anggaran sebesar 99,90%. Efisiensi yang dilakukan oleh Biro Umum ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan pagu usulan anggaran.

Setiap kegiatan dan pengeluaran negara yang akan dilakukan telah disusun dengan menggunakan perkiraan yang berdasarkan target kinerja dan *forecasting* yang berdasarkan pada tren kebutuhan layanan para *stakeholders*. Dengan demikian, pencapaian kinerja anggaran Biro Umum tercapai dengan optimal.

Penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,90% untuk mendapatkan capaian kinerja 101%, maka tingkat efisiensinya sebesar 99,90 atau efisien (kurang dari sama dengan 100%). Dengan kata lain, Biro Umum telah efisien menggunakan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan strategi dan upaya untuk mencapai hasil melebihi target kinerja

4.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pelaksanaan anggaran, Biro Umum secara rutin mengadakan rapat koordinasi per Bagian (unit kerja eselon III), dan juga

lintas Bagian di Biro Umum. Pemantauan intensif dalam pelaksanaan anggaran dilakukan untuk memastikan setiap unit kerja menjalankan tugas fungsinya, memberikan pelayanan terbaik, dan tetap mempertahankan penilaian kinerja di Biro Umum.

Pekerjaan di Biro Umum ada yang bersifat rutin bulanan atau periodik, namun juga ada yang bersifat insidentil. Kegiatan rutin bulanan telah dibuat perencanaan pelaksanaan kegiatan. Dan kegiatan insidentil mendapatkan perlakuan yang lebih intensif agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan atau yang memberikan dampak tidak tercapainya tujuan kegiatan dan target kinerja.

Unit kerja juga telah memiliki serangkaian pedoman dan panduan dalam pelaksanaan tugas fungsinya, sehingga dapat menjabarkan dengan jelas kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai target organisasi. Dan Biro Umum yang merupakan unit kerja eselon II yang bersentuhan langsung dengan layanan kepada para *stakeholders* DPR, memiliki etos kerja pelayanan yang adaptif sehingga pencapaian kinerja anggaran pun dapat dioptimalkan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tabel 3. 31 Tabel Realisasi Anggaran Biro Umum Tahun Anggaran 2024

NO	BAGIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	PBJ	1.948.590.000	1.947.659.745	99,95%	930.255	0,05%
2	PERLENGKAPAN DAN KENDARAAN	200.200.918.000	200.162.408.943	99,98%	38.509.057	0,02%
3	PAMDAL	110.760.089.000	110.493.769.597	99,76%	266.319.403	0,24%
4	YANKES	30.207.072.000	30.176.653.869	99,90%	30.418.131	0,10%
5	BIRO UMUM	4.246.131.000	4.243.489.118	99,94%	2.641.882	0,06%
JUMLAH		347.362.800.000	347.023.981.272	99,90%	338.818.728	0,10%

Tahun Anggaran 2024, Biro Umum mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp347.362.800.000. Realisasi anggaran yang berhasil dilaksanakan oleh Biro Umum sebesar Rp347.023.981.272 atau sebesar 99,90%. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Anggaran tersebut

digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Biro Umum selama Tahun Anggaran 2024. Berikut ini kegiatan-kegiatan pelaksanaan anggaran Tahun 2024:

1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.948.590.000 dengan realisasi sebesar Rp1.947.659.745 atau 99,95%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian nilai ITKP Setjen DPR RI melalui kegiatan-kegiatan seperti pendampingan penginputan kontrak pada SIRUP, pengembangan kompetensi SDM di Bagian PBJ maupun pihak-pihak terkait, *benchmarking* ke instansi yang memiliki UKPBJ di pusat maupun daerah, dan monev realisasi kontrak pengadaan barang/jasa Setjen DPR RI.

2. Bagian Perlengkapan dan Kendaraan

Bagian Perlengkapan dan Kendaraan mendapatkan alokasi anggaran terbesar yaitu sejumlah Rp200.200.918.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp200.162.408.943 atau 99,98%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Kendaraan selama Tahun Anggaran 2024 antara lain pemenuhan kebutuhan ATK dan ARTK bagi Anggota Dewan dan Setjen DPR RI, melakukan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional untuk menunjang kegiatan Dewan dan Setjen DPR RI, memberikan dukungan kegiatan-kegiatan kenegaraan di DPR RI, pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bagi Anggota Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI, dan pemberian bahan bakar kendaraan dinas dan operasional dengan berbasis RFID. Selain itu Bagian Perlengkapan dan Kendaraan juga membantu unit-unit kerja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk mendukung tugas dan fungsi unit-unit kerja di Setjen DPR RI;

3. Bagian Pengamanan Dalam

Bagian Pengamanan Dalam pada tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp110.760.089.000 dengan capaian realisasi Rp110.493.769.597 atau 99,76%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pengamanan Dalam antara lain pengadaan

seragam Pengamanan DPR, peremajaan sarana dan prasarana pengamanan, pengadaan *Autogate*, penyusunan *grand design* pengamanan, pembentukan korps musik dan Pengamanan Khusus, dukungan pengamanan kegiatan kenegaraan dan kesetjanaan baik skala nasional maupun internasional, dan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi SDM.

4. Bagian Layanan Kesehatan

Bagian Layanan Kesehatan mendapatkan anggaran sebesar Rp30.207.072.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp30.176.653.869 atau 99,90%. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pelayanan kesehatan seperti pengadaan obat-obatan, program Dedikasi untuk pegawai Setjen DPR RI, Digitalisasi Layanan Kesehatan DPR RI, pengembangan kompetensi SDM, serta pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan.

5. Biro Umum

Biro Umum atau sekretariat biro mendapatkan alokasi anggaran Rp4.246.131.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp4.243.489.118 atau 99,94%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan biro seperti monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum, pengembangan Layanan *Call Center* Anggota DPR RI, dan dukungan kegiatan-kegiatan rapat Biro Umum.

3.3 CAPAIAN PRESTASI

Selama tahun 2024 Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI telah menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan. Prestasi-prestasi tersebut antara lain:

1. Kematangan UKPBJ Level 3 “Proaktif”;
2. Sertifikasi 17 Standar LPSE;
3. 10 Terbaik Kelompok Lembaga pada PEKPP Tahun 2024 dengan Predikat “Pelayanan Prima”;
4. Juara 1 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI (SITEKAD);
5. Nilai ITKP Setjen DPR RI Tahun 2024 mencapai nilai 75,5 dengan predikat “Baik”;

6. Efisiensi pengelolaan aset BMN dengan mekanisme sewa kendaraan dinas;
7. Mensterilkan jalur evakuasi Senayan Park;
8. Penghargaan dari Walikota Jakarta Pusat, Dandim 0501 Jakarta Pusat, dan Kapolres Metro Jakpus;
9. Terintegrasinya Call Center 139 dengan 110, dan 139 dengan 119 dalam 24 jam;
10. Jumlah e-katalog sektoral Setjen DPR RI sebanyak 12 etalase;
11. Capaian TKDN sebesar 75,03%

4

PENUTUP

- Kesimpulan
- Rekomendasi



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran program Biro Umum Tahun 2024, dari 4 (empat) indikator kinerja, 2 (dua) indikator telah mencapai dan atau melampaui dari target yaitu, indikator kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum dengan capaian 3,733 dari target 3,35, sesuai hasil nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan, Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI, Layanan Akses Masuk ke DPR RI, dan Layanan Pengadaan Barang dan jasa dengan nilai baik berdasarkan unsur penilaian tanpa ada biaya/tarif menjadi layanan tertinggi dengan nilai indeks 3,699 atau 93,330. Sedangkan Indikator Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum telah melampaui target sebesar 99,90% dari target 99,00%.

Dalam melaksanakan layanan kegiatan, Biro Umum menghadapi beberapa kendala terkait sarana prasarana penunjang kesehatan, Profesionalisme SDM pengamanan dalam, dan SOP akses masuk ke Gedung DPR RI. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan Biro Umum untuk terus meningkatkan Layanan Biro Umum diantaranya adalah:

1. Penyusunan Standar Pelayanan Internal di lingkungan Biro Umum yang akan menetapkan pedoman untuk pemenuhan dukungan layanan teknis dan administrasi bidang layanan kesehatan, layanan pengamanan, dan layanan pengadaan barang/jasa;
2. Peningkatan kualitas dan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan untuk peningkatan kapasitas pegawai;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perkantoran;
4. Pengembangan aplikasi yang mendukung tugas dan fungsi Biro Umum;
5. Peningkatan kemampuan personel Pamdal DPR RI;
6. Program Dedikasi;

- 
7. Mewujudkan Digitalisasi Kesehatan;
 8. Digitalisasi Layanan di Unit-Unit Kerja;
 9. Modernisasi dan Digitalisasi Sarana dan Prasarana Pengamanan;
 10. Peremajaan Gudang Perlengkapan;
 11. Mekanisme RFID;
 12. Sewa kendaraan dinas dan operasional.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2024


**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sumariyandono, MPM,
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

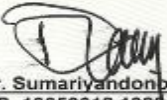
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

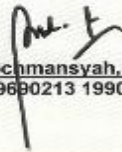
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Ir. Sumariyandono, MPM,
NIP. 19650618 198811 1 001


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H
NIP. 19690213 199003 2 001

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat "Baik"
		2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,35
		3. Nilai IKPA Biro Umum	96
		- Revisi DIPA	9,60
		- Deviasi Halaman III DIPA	9,60
		- Penyerapan Anggaran	24,00
		- Belanja Kontraktual	9,60
		- Penyelesaian Tagihan	14,40
		- Capaian Output	28,80
		4. Persentase Realisasi Anggaran	99%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp262.867.997.000,00

Deputi Bidang Administrasi,



Ir. Sumanrandono, MPM.
NIP. 19650618 198811 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
Kepala Biro Umum,



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199003 2 001

Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2023



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sumariyandono, MPM,
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Sumariyandono, MPM,
NIP. 19650618 198811 1 001

Jakarta, 5 Oktober 2023
Pihak Pertama,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Umum	1. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat "Baik"
		2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Umum	3,34
		3. Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum	98,60%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp271.680.363.000,00

Deputi Bidang Administrasi,

Ir. Sumariyandono, MPM,
NIP. 19650618 198811 1 001

Jakarta, 5 Oktober 2023
Kepala Biro Umum,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199003 2 001

SURAT TUGAS TIM PENYUSUN LKJ BIRO UMUM



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO, JAKARTA, KODE POS 10270
 Telp. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS **Nomor : 01/Pl.03.05/1/2025**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Tenaga Sistem Pendukung Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI;

b. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas.

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Dengan ini memberi tugas :

Kepada

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PERAN
1.	Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. NIP. 19620719 198803 1 001	Kepala Biro Umum	Pengarah
2.	Sri Wahyu Budhi Lestari, S.E., M.A.B NIP. 19680522 199502 2 001	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Penanggung Jawab
3.	dr. Dian Mardiyani NIP. 19810302 2011 101 2 002	Kepala Bagian Yankes	Penanggung Jawab
4.	Sultrino, S.E., M.AP NIP. 19760624 200003 1 002	Kepala Bagian Perlengkapan dan Kendaraan	Penanggung Jawab
5.	Yulianto, S.I.K NIP. 76070510	Kepala Bagian Pengamanan Dalam	Penanggung Jawab
6.	Vega Lavinesia, S.E., M.Ak. QRMA NIP. 19840425 2009 12 2 002	Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Koordinator
7.	Eva Dwi Cahyanti, S.Sos NIP. 19850817 200502 2 005	Kepala Subbagian Perlengkapan	Anggota

Kepada

No.	NAMA/NIP	JABATAN	PERAN
8.	Dani Hamdani, S.Pd. NIP. 19740924 199803 1 002	Kepala Subbagian Kendaraan	Anggota
9.	A. Husaini, S.Sos NIP. 19680728 199003 1 003	Kepala Subbagian Perencanaan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Barang/Jasa	Anggota
10.	Bambang Soleh Zulfikar, SKM. NIP. 19710415 199403 1 002	Kepala Subbagian Pelayanan Medik	Anggota
11.	Suparyanti, S.E. NIP. 19690506 199803 2 002	Kepala Subbagian Tata Usaha Layanan Kesehatan	Anggota
12.	Sugito Dapip Mashur, S.A.P., M.Tr.A.P. NIP. 19790202 2003 12 1 006	Kepala Subbagian Pengamanan Rumah Jabatan Pimpinan, Anggota, dan Wisma	Anggota
13.	Dodi Andresia, S.A.P., M.Si. NIP. 19620323 200701 1 003	Kepala Subbagian Pengamanan Kompleks DPR RI	Anggota
14.	Dede Jaenuddin, S.AP NIP. 19851220 2009 11 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15.	Muhammad Ilham Antarksa, S.E. NIP. 19940603 201903 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16.	Eida Inandya Adhima, S.Si. NIT. 150000057	Tenaga Sistem Pendukung	Anggota

Untuk : Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 pada tanggal 2 s.d. 17 Januari 2025.

Jakarta, 2 Januari 2025
 Kepala Biro Umum,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.



Foto Kegiatan 1. Pengamanan Kunjungan Delegasi pada Kegiatan Sidang IPPP ke Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI



Foto Kegiatan 2. Kegiatan Sosialisasi Aksi P4GN Sekretariat Jenderal DPR RI dan Penganugerahan Penghargaan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atas Komitmen dan Jasanya dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)



Foto Kegiatan 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Metode E-Purchasing dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI



Foto Kegiatan 4. Bagian Layanan Kesehatan Biro Umum Setjen DPR RI yang telah menerima penghargaan sebagai 10 Terbaik Kelompok Lembaga pada PEKPPP Tahun 2024 dengan Predikat Pelayanan Prima.



Foto Kegiatan 5. Pengamanan Kegiatan Sidang 16 Agustus